

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam memasuki perekonomian yang semakin berkembang saat ini, setiap perusahaan yang tumbuh dan berkembang memerlukan suatu pengendalian intern yang baik untuk mendukung dan memperlancar kegiatan produksinya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan berbagai macam faktor pendukung baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses kegiatan perusahaan.

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan dalam jangka panjang, sehingga dapat membantu kelangsungan hidup perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Selama ini persaingan yang terjadi didunia usaha semakin ketat, sehingga menyebabkan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh perusahaan semakin banyak dan semakin kompleks. Hal ini mendorong perusahaan untuk membuat suatu sistem pengendalian dimana sistem pengendalian ini merupakan alat yang diperlukan karena untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin harus mempunyai cara-cara untuk mengetahui apakah pekerjaan yang telah didelegasikan sudah dilaksanakan dengan baik.

Sistem pengendalian intern dapat dikatakan telah memadai jika perusahaan mampu mengidentifikasi unsur-unsur sistem pengendalian intern dan tujuan pengendalian intern dengan baik. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, (2) Sistem

wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, (3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, dan (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Tujuan utama diterapkannya pengendalian terhadap persediaan yaitu untuk mengamankan atau mencegah persediaan dari tindakan pencurian dan kerusakan serta menjamin keakuratan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.

Persediaan adalah aktiva yang dimiliki untuk dijual kembali atau barang yang digunakan (dikonsumsi) dalam memproduksi barang yang akan dijual. Barang yang akan dijual tersebut adalah barang jadi yang merupakan hasil akhir dari proses produksi. Dalam suatu perusahaan, persediaan produk jadi merupakan faktor pemegang peran penting dan faktor utama yang dapat menunjang kelangsungan hidup suatu perusahaan, sehingga seringkali merupakan bagian yang sangat besar dari keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya persediaan produk jadi yang cukup diharapkan proses kegiatan usaha di perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, persediaan produk jadi sangat peka terhadap pencurian, kerusakan, perubahan harga pasar, pemborosan, dan penyimpangan lainnya.

Pengendalian intern persediaan diperlukan guna menjaga keamanan aktiva milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan yang ditetapkan terlebih dahulu. Selain dari pada itu juga meningkatkan operasional perusahaan sehingga persediaan produk jadi efektif dan efisien. Bila persediaan dalam perusahaan

mengalami pencurian, kesalahan, dan kerusakan karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak perusahaan akan menyebabkan terganggunya kegiatan operasi perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang mencakup perkebunan kelapa sawit dan karet. Areal Perkebunannya seluas 158.505,41 ha yang terdapat di 34 kebun PTPN III. Luasnya areal perkebunan ini guna memenuhi persiapan bahan baku dalam jangka waktu panjang untuk menjamin kelangsungan produksi dan masa depan perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki 12 (duabelas) pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah sebesar 585 ton tandan buah segar per jam dan 7 (tujuh) pabrik karet dengan kapasitas olah sebesar 167,8 ton karet kering per hari. Produk utamanya antara lain Minyak Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil – CPO*), Inti Kelapa Sawit (Kernel) dan produk hilir karet (lateks pekat, *crumb rubber* dan *sheet*). Mengingat persediaan jadi *Crude Palm Oil (CPO)* sebagai salah satu aset terpenting bagi perusahaan, maka penanganan yang efektif atas persediaan harus menjadi prioritas utama yang patut di pertimbangkan oleh pihak manajemen perusahaan. Perolehan persediaan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dilakukan dengan berbagai cara seperti produksi dari kebun sendiri dan dengan membeli dari pihak ketiga.

Dalam pengadaan persediaan *Crude Palm Oil (CPO)* perusahaan, jika pengendalian intern yang dilaksanakan tidak sesuai dengan unsur-unsur yang

berlaku di dalam perusahaan akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kerugian. Misalnya adanya persediaan seperti *Crude Palm Oil (CPO)* yang dicuri oleh karyawan untuk menguntungkan dirinya sendiri yang merupakan harta perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Permasalahan yang lain adalah dalam pengeluaran *Crude Palm Oil (CPO)* dimana bagian yang melakukan pengeluaran *Crude Palm Oil (CPO)* melakukan penyelewengan terhadap *Crude Palm Oil (CPO)* dengan menggelapkan *Crude Palm Oil (CPO)* dalam laporan persediaan. Maka hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Upaya untuk mengantisipasi kerugian tersebut, maka diperlukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern yang baik dan efektif untuk menjaga persediaan *Crude Palm Oil (CPO)*.

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas begitu besar peran sistem pengendalian intern persediaan produk jadi bagi perusahaan, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan skripsi yang berjudul **“EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PERSEDIAAN PRODUK JADI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang menjadi pembahasan, yaitu **“Apakah sistem pengendalian intern persediaan produk jadi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah efektif?”**

1.3. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki penulis serta menghindari kesimpangsiuran pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini yaitu Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Persediaan Produk Jadi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, yang menjadi persediaan jadi yaitu persediaan *Crude Palm Oil (CPO)*.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektif tidaknya sistem pengendalian intern persediaan produk jadi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil analisis data yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian intern persediaan produk jadi.
2. Bagi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penerapan sistem pengendalian intern persediaan produk jadi.
3. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan menciptakan suatu karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem juga merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Dengan diketahuinya suatu sistem maka perlu diketahui pula batasan-batasan dengan terbentuknya sistem tersebut. Batasan sistem yaitu suatu batasan/kondisi yang memisahkan antara sistem dengan sekitarnya. Sehingga terbentuk suatu wilayah yang berada di sekitar sistem itu sendiri yaitu yang dinamakan Sub-sistem dan Supra sistem. Misalnya suatu perusahaan dapat disebut dengan suatu sistem dan industri yang merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut dengan supra sistem. Kalau dipandang industri sebagai suatu sistem, maka perusahaan dapat disebut sebagai sub sistem. Demikian juga bila perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka sistem akuntansi adalah sub sistemnya.

Menurut Anastasia Diana, **”Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Suatu sistem pasti tersusun dari sub—sub sistem yang lebih kecil yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.”**¹

¹ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Pertama, ANDI, Yogyakarta, 2011, hal.3

Menurut Mulyadi, **“Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.”**²

Dari definisi diatas dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum dari sistem adalah sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Kesimpulan dari beberapa definisi sistem di atas adalah sistem merupakan kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan akan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu atau bisa dikatakan bahwa sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk menyajikan informasi.

2.2 Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak dipergunakan dalam berbagai kepentingan dan pengertian. Pengendalian intern dapat mempunyai arti sempit atau luas. Dalam artian yang sempit, pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Dalam artian yang luas, pengendalian intern tidak hanya

² Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keenam, Cetakan Keenam, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 2

meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengendalian. Semua pimpinan perusahaan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pengendalian intern. Fungsi dari pengendalian intern semakin penting dikarenakan semakin berkembang perusahaan.

Pengendalian intern memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena pengendalian intern merupakan alat bagi manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Pengendalian intern juga membantu manajemen untuk menilai organisasi yang ada serta operasi yang dilakukan perusahaan. Semua ini bertujuan untuk mencegah dan menghindari timbulnya kesilapan, kecurangan, dan penyelewengan.

Pengendalian intern merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai ukuran yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan untuk mengawasi dan mengarahkan para pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berikut beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian pengendalian intern, antara lain :

a) Menurut Mulyadi bahwa:

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.³

b) Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati:

Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.⁴

a) Menurut buku TMbooks bahwa:

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku.⁵

c) Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam buku Sukrisno

Agoes bahwa :

Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan. (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu metode yang digunakan perusahaan untuk menjaga harta kekayaan perusahaan tersebut, serta pengendalian intern tersebut juga berperan dalam

³ Mulyadi, **Op.Cit.**, hal. 163

⁴ Anastasia Diana, **Op.Cit**, hal. 82

⁵TMbooks, **Sistem Informasi Akuntansi (Konsep dan Penerapan)**, Edisi Satu : ANDI Yogyakarta, Jakarta, 2015, hal. 36

⁶Sukrisno Agoes, **Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntan Publik)**, Edisi Keempat, Buku Satu, Cetakan Kelima: Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 100

melindungi aktiva, keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan efektifitas operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum.

Dengan adanya pengendalian intern diharapkan dapat memeriksa kemungkinan terjadinya penyelewengan, penggelapan, atau pemborosan maupun pengeluaran yang tidak mampu dipertanggungjawabkan yang dapat merugikan bahkan menghancurkan perusahaan. Semua hal ini disebabkan semakin berkembangnya perusahaan secara langsung memperbesar perusahaan dalam semua aspek dalam perusahaan sehingga pemimpin didalam tidak dimungkinkan untuk mengawasi segala operasi perusahaan secara langsung sehingga pengendalian intern diharapkan mampu mengawasi segala aspek dan operasi perusahaan secara menyeluruh.

2.3 Tujuan Pengendalian Intern

Setiap perusahaan yang menjalankan operasinya sangat memerlukan pengendalian intern yang baik sehingga dapat terhindar dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan, serta menjamin keakuratan (ketetapan) penyajian dalam laporan keuangan.

Suatu perusahaan harus dapat memahami pengertian atas sistem pengendalian internal sehingga perusahaan dapat mengetahui tujuan dari penerapan sistem pengendalian intern tersebut. Adapun tujuan-tujuan dari sistem pengendalian intern menurut beberapa pendapat para ahli, yaitu:

Menurut COSO (*the Committee Of Sponsoring Organization*) oleh Anastasia Diana dan Lilis Setiawan, tujuan pengendalian intern meliputi :

- “1. Efektifitas dan efisiensi operasi**
- 2. Reliabilitas pelaporan keuangan**
- 3. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.”⁷**

Menurut Mulyadi, tujuan pengendalian intern adalah :

- “1. Keandalan laporan keuangan**
- 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku**
- 3. Efektivitas dan efisiensi operasi.”⁸**

Tujuan pengendalian intern dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keandalan Laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan para pengguna laporan lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan.

2. Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran dan tujuan perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan.

⁷ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, **Op.Cit.** hal. 83

⁸ Mulyadi, **Auditing**, Edisi Keenam, Buku Satu: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 180

3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

Perusahaan publik, perusahaan nonpublik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan.

Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi:

- a. Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan, dengan meliputi pencapaian tujuan atas target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya (asset) perusahaan.
- b. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim.
- c. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.

Hal-hal yang menyebabkan pengendalian intern tidak efektif adalah kurangnya penerapan pengendalian intern yang memadai. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Tujuan yang dimaksud adalah proses pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi.

2.4 Komponen Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian internal yang baik harus memenuhi beberapa kriteria atas unsur-unsur. Menurut Sukrisno Agoes, pengendalian intern terdiri dari lima

komponen yang saling berkaitan. Lima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

- 1. Lingkungan pengendalian**
- 2. Penaksiran Resiko**
- 3. Aktivitas Pengendalian**
- 4. Informasi dan komunikasi**
- 5. Pemantauan⁹**

Komponen pengendalian intern dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penaksiran resiko

Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengelolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan.

⁹ Sukrisno Agoes, **Op.Cit**, hal. 100-102

4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan *customers* dan komentar dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

2.5 Prinsip-prinsip Pengendalian Intern

Prinsip pengendalian intern didasarkan pada pembagian tugas dan pemisahan wewenang antara pegawai, maka sering orang mengira bahwa prinsip tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan yang kecil yang mempunyai pegawai yang jumlahnya terbatas. Prinsip pengendalian intern yang diterapkan

pada suatu perusahaan dengan perusahaan lainya adalah berbeda-beda tergantung beberapa faktor seperti operasi dan besarnya perusahaan.

Menurut Sigit Hermawan dalam penelitian Anto Fery Bate'e, dalam menerapkan pengendalian intern yang baik harus meliputi lima prinsip aktivitas pengendalian yaitu :

- 1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas**
- 2. Dokumentasi dan pencatatan yang baik**
- 3. Penjagaan terhadap aktiva**
- 4. Prosedur pembuktian dan pengamanan**
- 5. Evaluasi oleh auditor internal dan eksternal.¹⁰**

Berikut ini akan dijelaskan prinsip-prinsip pengendalian intern :

1. Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab Yang Jelas

Tugas dan tanggung jawab harus dinyatakan secara jelas dalam deskripsi tugas (*job description*) agar tidak kesulitan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam persediaan adalah :

- a. Fungsi penerimaan barang jadi harus dipisahkan dari fungsi penyimpanan barang jadi.
- b. Fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pengeluaran barang jadi.

2. Dokumentasi dan Pencatatan Yang Baik

Dokumentasi dan pencatatan yang baik diperlukan agar semua dapat ditelusuri sampai bukti transaksi bila ada kesalahan. Dokumentasi dan pencatatan yang baik dalam persediaan adalah :

¹⁰ Anto Fery Bate'e, **Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Fisik Persediaan Pada PT. Sinar Sosro Tanjung Morawa**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2015, hal 25.

- a. Daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik persediaan. Daftar hasil perhitungan fisik berisi informasi hasil perhitungan fisik persediaan. Daftar ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar untuk *meng-adjust* kartu persediaan dan kartu gudang, serta merupakan dokumen pendukung bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum.
- b. Pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Hal ini dimaksudkan agar setiap dokumen sumber dibuat atas dasar data yang dijamin ketelitiannya.
- c. Pencatatan persediaan dilakukan secara *perpetual inventory* yaitu dengan melakukan pencatatan secara terus-menerus.
- d. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan.
- e. *Adjustment* terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi (kuantitas maupun harga pokok total) tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik.

3. Penjagaan Terhadap Aktiva

Sebagaimana tujuan dari pengendalian intern yakni aktiva yang dilindungi, maka penjagaan aktiva menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian intern.

Penjagaan terhadap persediaan yang dilakukan adalah :

- a. Pengamanan terhadap catatan-catatan atau data yang terdapat pada komputer. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga agar data-data yang

ada pada komputer tidak diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk itu dilakukan otorisasi terhadap arsip data yang ada di komputer.

- b. Pengamanan fisik atas persediaan yang dilakukan oleh *security* dimana *security* turut menjalankan pengendalian terhadap pengeluaran atau pengiriman barang jadi.

4. Prosedur Pembuktian dan Pengamanan

Prosedur pembuktian dan pengamanan harus digunakan untuk melindungi persediaan dan memastikan bahwa data akuntansi dapat dipercaya dalam persediaan adalah :

- a. Kartu perhitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggung jawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik.
- b. Perhitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan dua kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek.
- c. Kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam kartu perhitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam perhitungan fisik dicatat dalam daftar hasil perhitungan fisik.
- d. Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya.

5. Evaluasi Oleh Auditor Internal dan Eksternal

Evaluasi terhadap pengendalian intern perlu terus menerus dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya yang dilakukan oleh auditor

internal maupun eksternal. Evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal dalam persediaan adalah :

- a. Evaluasi oleh audit internal, pihak manajemen secara terus menerus memantau pelaksanaan pengendalian internal persediaan, jika masih terdapat kelemahan pihak manajemen akan memikirkan solusinya dan kemudian merevisi pengendalian yang ada.
- b. Selain oleh auditor internal, evaluasi dapat juga dilakukan oleh auditor eksternal yaitu dengan audit menyeluruh yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen. Tujuannya adalah untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan dan hasilnya akan diberikan kepada manajemen untuk dilakukan perbaikan.

2.6 Pengertian dan Jenis-jenis Persediaan

2.6.1 Pengertian Persediaan

Pada setiap perusahaan, baik perusahaan itu perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur, pasti memiliki persediaan. Persediaan dimiliki pada setiap perusahaan karena persediaan itu merupakan bagian yang sangat penting dari perusahaan itu untuk kelangsungan hidup perusahaan. Istilah persediaan (*inventory*) adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumberdaya – sumberdaya organisasi yang disimpan dalam antisipasi pemenuhan permintaan. Dengan adanya persediaan maka perusahaan akan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, berupa jasa maupun barang berdasarkan jenis perusahaannya.

Persediaan merupakan bagian utama dalam neraca yang berpengaruh terhadap laporan laba-rugi perusahaan. Persediaan merupakan elemen aktiva lancar yang penting sehingga seringkali menjadi bagian yang sangat besar dari keseluruhan aktiva lancar. Elemen persediaan akan berpengaruh terhadap penentuan laba perusahaan, penentuan tingkat likuiditas perusahaan, dan kebenaran penyajian neraca. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian persediaan, maka dikutip beberapa pengertian persediaan sebagai berikut :

Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008) dalam buku Dwi Martini mendefinisikan :

Persediaan sebagai aset yang :

- 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa**
- 2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut**
- 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.¹¹**

Menurut Munte dan Simarmata bahwa :

“Persediaan (*inventory*) adalah barang yang diperoleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha normalnya.”¹²

Menurut Bantu dan Hendrik,

Persediaan barang dagang (*merchandise inventory*) adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali. Untuk perusahaan pabrik, termasuk dalam persediaan adalah barang-barang yang akan digunakan untuk proses produksi selanjutnya.¹³

¹¹ Dwi Martani, dkk., **Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK**, Edisi Kedua, Buku Satu, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 245

¹² Mei H.M. Munte dan Melissa T.A. Simarmata, **Praktek Komputer Akuntansi**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP NOMMENSEN, Medan, 2017, hal. 142

¹³ Bantu Tampubolon dan Hendrik Samosir, **Akuntansi Keuangan**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP NOMMENSEN, Medan, 2016, hal. 243

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas, persediaan merupakan sejumlah bahan atau barang yang di sediakan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dan komponen atau langganan setiap waktu. Dengan adanya persediaan, maka akan mempermudah atau memperlancar jalannya operasi suatu perusahaan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang memerlukan barang atau jasa yang dibutuhkan.

2.6.2 Jenis-jenis Persediaan

Setiap perusahaan memiliki barang yang digolongkan sebagai persediaan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis dan aktivitas yang dimiliki perusahaan. Bagi perusahaan dagang, barang-barang yang dimilikinya ditunjukkan untuk dijual kembali dan disebut persediaan barang dagangan. Berbeda dengan perusahaan industri dan perkebunan yang mengadakan pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang akan diolah dalam proses produksi.

Menurut James K. Stice, et al., bahwa:

Kata persediaan (atau persediaan barang dagang) secara umum di tunjukkan untuk barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang, baik berupa usaha grosir maupun ritel, ketika barang-barang tersebut telah dibeli dan kondisi siap untuk dijual. Kata bahan baku (*raw materials*), barang dalam proses (*work in process*), dan barang jadi (*finished goods*) untuk dijual ditunjukkan untuk persediaan di perusahaan manufaktur.¹⁴

¹⁴ James D. Stice, et al., *Intermediate Accounting, 16th Edition*, Ali Akbar, **Akuntansi Keuangan**, Buku Satu, Edisi Keenam Belas : Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 572

Untuk dapat memahami perbedaan keberadaan dari tiap-tiap jenis persediaan tersebut maka dapat dilihat dari penggolongan jenis-jenis persediaan secara garis besar yaitu:

1. Persediaan Bahan Baku

Persediaan bahan baku yaitu persediaan dari barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi dimana barang-barang ini diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari *supplier* atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau pengadaan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya bahan baku, pembuatan produk tidak akan dapat dihasilkan.

Bahan baku adalah bahan dasar yang diolah menjadi produk selesai. Bersama-sama dengan bahan baku, dikenal pula bahan-bahan yang lain yang disebut sebagai bahan penolong yang sifatnya hanya membantu dan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan bahan baku. Bahan penolong merupakan bahan tambahan untuk mendukung jalannya proses produksi. Penggolongan bahan baku pada setiap perusahaan berbeda-beda tergantung jenis perusahaannya. Pada perusahaan industri seperti perusahaan mebel dimana kayu merupakan bahan baku dalam pembuatan mebel. Berbeda dengan perusahaan perkebunan yang bahan bakunya terdiri dari bibit, pupuk, dan bahan kimia. Ketiga jenis ini dimasukkan kedalam biaya produksi tanaman. Sedangkan bahan baku pada perusahaan perkebunan seperti pupuk merupakan barang jadi untuk suatu perusahaan belum tentu merupakan bahan baku perusahaan lain.

2. Persediaan Barang Dalam Proses

Persediaan produk dalam proses meliputi barang-barang yang masih dalam pengerjaan yang memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual. Produk dalam proses pada umumnya dinilai berdasarkan jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai dengan tanggal tertentu.

3. Persediaan Barang Jadi

Persediaan produk jadi meliputi semua barang yang diselesaikan dari proses produksi dan siap untuk dijual. Seperti halnya produk dalam proses, produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut.

4. Persediaan Bahan Penolong

Persediaan bahan penolong meliputi semua barang-barang yang dimiliki untuk keperluan produksi, akan tetapi tidak merupakan bahan baku yang membentuk produk jadi, yang termasuk dalam kelompok persediaan ini antara lain minyak pelumas untuk mesin-mesin pabrik, lem, benang untuk menjilid dan buku-buku pada perusahaan percetakan.

5. Lain-lain Persediaan

Lain-lain persediaan misalnya *supplier* kantor, alat-alat pembungkus seperti halnya pada perusahaan dagang.

2.7 Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan

2.7.1 Metode Pencatatan Persediaan

Untuk menerapkan salah satu penilaian diperlukan suatu pencatatan yang baik sehingga memberikan gambaran yang jelas akan posisi keuangan dan laba dari suatu perusahaan. Dan untuk membentuk penyajian persediaan agar menjadi lebih teliti dan relevan dikembangkan metode pencatatan persediaan. Mulyadi dalam sistem akuntansi menyatakan ada dua macam metode pencatatan persediaan yang digunakan yaitu: “**Metode mutasi persediaan (*perpetual inventory method*) dan metode persediaan fisik (*physical inventory method*).**”¹⁵

1. Metode Mutasi Persediaan (*perpetual inventory method*)

Sistem pencatatan metode perpektual disebut juga metode buku yakni sistem dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat dipembukuan. Setiap jenis barang dibuatkan kartu persediaan dan didalam pembukuan dibuat rekening pembantu persediaan. Rincian dalam buku pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar. Rekening yang digunakan untuk mencatat pembelian, penjualan dan saldo persediaan. Setiap perubahan dalam persedian diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan, sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam rekening persediaan. Masing-masing kolom dirinci lagi untuk kuantitas dan harga perolehan.

Persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan bahan baku pembantu persediaan yang berisi catatan untuk setiap jenis persediaan. Buku

¹⁵ Mulyadi, **Op.Cit.**, hal. 556

pembantu persediaan menunjukkan kuantitas dan harga perolehan untuk setiap jenis barang yang ada di dalam persediaan. Dalam metode perpetual ini terdapat kelemahan pada saat menentukan nilai dan jumlah barang. Karena dengan metode pencatatan yang kontiniu ini berarti saldo persediaan setiap saat dapat diketahui, namun perlu diperhatikan bahwa dengan hanya menghitung jumlah barang berdasarkan catatan akan mengakibatkan nilai persediaan berlebih, karena adanya persediaan yang rusak.

2. Metode Persediaan Fisik (*physical inventory method*)

Metodi ini mengharuskan kita menghitung jumlah fisik dari persediaan yang ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah harga pokoknya. Jumlah persediaan dapat dinyatakan dalam satuan pengukuran lain yang lazim diterima.

Dengan ini bagian pembukuan tidak membukukan mutasi persediaan dalam buku persediaan dengan kata lain persediaan tidak memiliki kartu stok (*stock card*). Jadi dalam sistem ini tidak dapat diketahui jumlah persediaan setiap saat, karena tidak pernah dicatat pertambahannya maupun pengurangannya. Oleh karena itu maka untuk mengetahui jumlah persediaan harus dilakukan perhitungan secara fisik langsung ke gudang, agar diketahui berapa jumlah yang bertambah dan jumlah yang berkurang. Perhitungan persediaan secara fisik dapat dilakukan secara periodik, misalnya dapat dilaksanakan sebulan sekali, triwulan, semesteran atau dalam waktu satu tahun, tergantung pada kebijakan perusahaan yang bersangkutan, sehingga metode pencatatan persediaan secara fisik disebut juga sebagai metode periodik.

Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah:

- “1. Kartu gudang**
- 2. Kartu Persediaan**
- 3. Jurnal Umum”¹⁶**

1. Kartu Gudang

Catatan ini digunakan untuk mencatat mutasi kuantitas terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan.

2. Kartu Persediaan

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang disimpan di gudang yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan, berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan.

3. Jurnal Umum

Catatan ini digunakan untuk mencatat jurnal *adjustment* rekening persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam rekening dengan saldo menurut perhitungan fisik.

Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam penghitungan fisik persediaan menurut Mulyadi adalah:

- “1. Panitia penghitung fisik persediaan**
- 2. Fungsi akuntansi**

¹⁶ Mulyadi, *Ibid*, hal 560

3. Fungsi gudang”¹⁷

1. Panitia penghitung fisik persediaan

Panitia ini berfungsi untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil penghitungan tersebut kepada bagian karu persediaan untuk digunakan sebagai dasar *adjustment* terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Seperti telah disebutkan diatas, panitia penghitungan fisik persediaan terdiri dari:

a. Pemegang kartu penghitungan fisik

Pemegang kartu penghitungan fisik bertugas untuk menyimpan dan mendistribusikan kartu penghitungan fisik kepada para penghitungan, melakukan perbandingan hasil penghitungan fisik persediaan yang telah dilaksanakan oleh penghitung dengan pengecek, dan mencatat hasil penghitungan fisik persediaan dalam daftar hasil penghitungan fisik.

b. Penghitung

Penghitung bertugas melakukan penghitungan pertama terhadap persediaan, dan mencatat hasil penghitungan tersebut ke dalam bagian ke-3 kartu penghitungan fisik, serta menyobek bagian kartu tersebut untuk diserahkan kepada pemegang kartu penghitungan fisik.

c. Pengecek

Pengecek bertugas melakukan penghitungan kedua terhadap persediaan yang telah dihitung oleh penghitung dan mencatat hasil penghitungannya

¹⁷ Mulyadi, *Ibid*, hal 579

ke dalam bagian ke-2 kartu penghitungan fisik serta menyobek bagian kartu tersebut untuk diserahkan kepada pemegang kartu penghitung fisik.

2. Fungsi akuntansi

Dalam sistem penghitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk:

- a. Mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik.
- b. Mengalikan kuantitas dan harga pokok per satuan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik.
- c. Mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik.
- d. Melakukan *adjustment* terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan.
- e. Membuat bukti memorial untuk mencatat *adjustment* data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan.

3. Fungsi gudang

Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan *adjustment* data akuntansi persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan.

2.7.2 Metode Penilaian Persediaan

Hery mengemukakan bahwa:

Dalam akuntansi, dikenal tiga metode yang dapat digunakan dalam menghitung besarnya nilai persediaan akhir, yaitu : metode FIFO (*first-in first-out*), metode LIFO (*last-in first-out*), dan metode rata-rata (*average cost method*).¹⁸

¹⁸ Hery, **Akuntansi**, Edisi Kedua, Cetakan Pertama : Gava Media, Jakarta 2016, hal. 79

1. Metode FIFO (*first-in first-out*)

Dengan menggunakan metode FIFO, harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa unit atau barang yang pertama kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Jadi, penekanannya di sini bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan lebih kepada harga pokoknya. Dengan menggunakan metode FIFO, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli.

2. Metode LIFO (*last-in first-out*)

Dengan menggunakan metode LIFO, harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa unit atau barang yang terakhir kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Sama seperti metode FIFO, penekanannya bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan harga pokoknya. Dengan menggunakan metode LIFO, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli.

3. Metode Rata-rate (*average cost method*)

Dengan menggunakan metode rata-rata, harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehannya per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang tersedia untuk dijual memiliki biaya per unit yang sama (rata-rata). Berdasarkan metode rata-rata,

harga pokok barang tersedia untuk dijual dialokasikan pada dasar biaya rata-rata tertimbang per unit.

2.8 Pengendalian Intern Persediaan Produk Jadi

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda beda dalam menentukan tingkat persediaan produk jadi yang ada di dalam perusahaan. Tujuan adanya persediaan produk jadi adalah untuk meredam fluktuasi permintaan. Persediaan dapat di fungsikan untuk memenuhi kekurangan pasokan produk jadi di pasaran sebagai akibat permintaan yang berlebih. Oleh karena itu, tingkat persediaan produk jadi yang ditetapkan dalam menjaga kestabilan pemasokan produk ke pelanggan sehingga persediaan produk jadi sangat memegang peranan penting dalam pemenuhan permintaan pasar dan konsumen.

Pengendalian persediaan produk jadi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Widya Tamodia, menyatakan bahwa :

Pengendalian intern atas persediaan merupakan hal yang penting karena persediaan adalah bagian yang amat penting dari suatu perusahaan dagang. Persahaan yang sukses biasanya amat berhati-hati dalam melakukan pengawasan atas persediaan yang dimilikinya. Pengendalian intern atas persediaan meliputi penghitungan fisik yang harus dilakukan setiap tahun karena dengan cara inilah suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti jumlah persediaan yang ada.¹⁹

Menurut Hery menyatakan bahwa:

Kalau kita berbicara mengenai pengendalian internal atas persediaan, sesungguhnya ada 2 tujuan utama dari diterapkannya pengendalian internal tersebut, yaitu untuk mengamankan atau mencegah aktiva

¹⁹ Widya Tamodia, *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang Dagangan Pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado.*, 2013, hal. 25

perusahaan (persediaan) dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan, serta menjamin keakuratan (ketepatan) penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Didalamnya termasuk pengendalian atas keabsahan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan.²⁰

Pengendalian untuk melindungi persediaan melibatkan pembentukan dan penggunaan tenaga keamanan untuk mencegah kerusakan persediaan atau pencurian oleh karyawan. Persediaan harus disimpan dalam gudang atau area lain yang aksesnya dibatasi pada karyawan yang berwenang saja. Pengeluaran barang dari gudang harus dikontrol dengan menggunakan formulir permintaan produk yang telah diotorisasi semestinya, yang harus disahkan oleh petugas yang berwenang. Area penyimpanan juga harus aman untuk menghindari kerusakan persediaan.

Sehingga didalam perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur diperlukan pengendalian intern salah satunya adalah pengendalian intern atas persediaan produk jadi. Pengendalian intern atas persediaan produk jadi seharusnya dimulai pada saat produk diterima. Laporan penerimaan produk yang bernomor urut tercetak seharusnya disiapkan oleh bagian penerimaan untuk menetapkan tanggung jawab atas persediaan. Setelah laporan penerimaan produk, formulir pesanan pembelian, dan faktur tagihan dicocokkan, perusahaan akan mencatat persediaan dalam catatan akuntansi.

2.8.1 Unsur-unsur Pengendalian Intern Persediaan Produk Jadi

Pengendalian intern sangatlah diperlukan guna menjamin kelancaran aktivitas perusahaan dengan melihat tingkat kesalahan dan penyelewengan yang

²⁰ Hery, **Op. Cit**, hal. 72

terjadi. Untuk mencapai tujuan pengendalian intern di perlukan unsur-unsur sistem pengendalian intern persediaan produk jadi.

Mulyadi menjelas unsur-unsur pengendalian intern yang dibentuk untuk mencapai tujuan pengendalian intern adalah :

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
- 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban.**
- 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.**
- 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.²¹**

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi, penyimpanan dan akuntansi.
 - a. Fungsi Operasi

Fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan.
 - b. Fungsi Penyimpanan

Fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aset perusahaan.
 - c. Fungsi Akuntansi

Fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

²¹ Mulyadi, **Op. Cit.**, hal. 164

2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Dengan adanya pemisahan fungsi, maka catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya. Jika misalnya fungsi penyimpanan disatukan dengan fungsi akuntansi, perangkapan ini akan membuka kemungkinan terjadi pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga data akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya dan akhirnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban.

Sistem wewenang dan prosedur pembukuan merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan pengendalian terhadap operasi dan transaksi dapat dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan lebih dahulu. Dalam setiap prosedur akan digunakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti terjadinya transaksi dan juga sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut.

Dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan demikian, sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalannya yang tinggi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan intern wewenang dan proses pencatatan yang telah diciptakan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya.

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:

1. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transaksi.
2. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau organisasi lain.
4. Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
5. Karyawan perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya.
6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya.

7. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian yang lain.

Adanya suatu pengawasan pengendalian intern dalam perusahaan akan menjamin efektivitas unsur-unsur pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi terjamin ketelitian dan keandalannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh :

1. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang menduduki jabatan tersebut.
2. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Memberikan pelatihan bagi karyawan agar dapat menguasai tugas yang diberikan perusahaan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian intern persediaan produk jadi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang berada di Jl. Sei Batang Hari No. 2 Medan, Sumatera Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data untuk menjawab apakah efektif tidaknya sistem pengendalian intern persediaan produk jadi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, selanjutnya di evaluasi dan di interpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada.

3.3 Jenis Data Penelitian

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, buku-buku teks literatur mengenai pengendalian intern persediaan. Data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk sudah jadi, seperti : struktur organisasi, daftar persediaan 2016, *flowchart* prosedur produksi dan *flowchart* prosedur penjualan.

3.4 Metode Penelitian Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Metode ini untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan bahasa ilmiah dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber buku bacaan serta bahan perkuliahan yang berhubungan erat dengan pokok penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan sebagai objek yang diteliti melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan terutama pada bagian-bagian yang terkait dalam persediaan produk jadi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan komparatif yaitu analisis deskriptif yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu.

Menurut Syofian, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan komparatif adalah sebagai berikut :

1. **Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain.**
2. **Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.²²**

Metode ini akan mengevaluasi sistem pengendalian intern persediaan produk jadi. Langkah-langkah yang diambil penulis untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dan dianalisis secara deskriptif dan komparatif apakah sistem pengendalian intern tersebut layak dikatakan efektif atau tidaknya yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Mengenai hal-hal yang akan dibandingkan adalah 4 unsur sistem pengendalian intern persediaan produk jadi, antara lain:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

²² Syofian Siregar, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Edisi Pertama: Kencana, Jakarta, 2013, hal. 7

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pengendalian intern persediaan produk jadi dikatakan efektif jika PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah menerapkan 4 (empat) unsur sistem pengendalian intern persediaan produk jadi tersebut. Jika perusahaan hanya menerapkan 2 atau 3 dari 4 unsur sistem pengendalian intern tersebut, maka sistem pengendalian intern persediaan produk jadi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dikatakan belum efektif.